

PENGARUH PENGUMUMAN PERUBAHAN PERINGKAT OBLIGASI TERHADAP PERILAKU INVESTOR KEPADA PERUSAHAAN ASING DAN DOMESTIK
Jahra Yusri

PENGARUH USER TRAINING DAN DATA ANALYSIS PADA IMPLEMENTASI SYSTEM APPLICATION PRODUCT (SAP) PT. SEMEN PADANG
Febryandha Aranda

DAMPAK FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT: MENGGUNAKAN PANEL DATA
*Anton/
Elvedone/
Ramonawati*

PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP PRESENTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU GEMA NURANI BEKASI
Novi Yenti

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO INVESTASI PADA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Adhyani

ANALISIS RETURNY SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KENAIKAN TARIF BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Rizka Hadya

PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-SPT DAN E-PAYMENT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG)
Dewi Zafwa

PENGARUH HARGA, BRAND IMAGE, DAN LIFE STYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG TAS FURLA DI KOTA PADANG
Febri Susanti

PENGARUH PENGUMUMAN PERUBAHAN PERINGKAT OBLIGASI TERHADAP PERILAKU INVESTOR KEPADA PERUSAHAAN ASING DAN DOMESTIK <i>Indra Yusra</i>	1
PENGARUH USER TRAINING DAN DATA ANALYSIS PADA IMPLEMENTASI SYSTEM APPLICATION PRODUCT (SAP) PT. SEMEN PADANG <i>Febryandha Ananda</i>	21
DAMPAK FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT: MENGGUNAKAN PANEL DATA <i>Arifin/ Elvafona Ramonawati</i>	41
PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP PRESENTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU GEMAMURANI BEKASI <i>Novi Yanti</i>	55
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO INVESTASI PADA SAHAM PERUSAHAAN MANUFATUR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Allyani</i>	73
ANALISIS RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KENAIKAN TARIF BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERUSAHAAN MANUFATUR DI BEI <i>Rizka Hadya</i>	86
PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-SPT DAN E-PAYMENT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG) <i>Dani Zulvia</i>	105
PENGARUH HARGA, BRAND IMAGE, DAN LIFE STYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG TAS FURLA DI KOTA PADANG <i>Fetri Sasanti</i>	117

DAMPAK FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT: MENGGUNAKAN PANEL DATA

Antoni

Universitas Bang Hatta
(antoni_yoga@gmail.com)

Elvudena

STIE "KBP" Padang
(miffah02@gmail.com)

Ramonavera

STIE "KBP" Padang
(ramonavera66@yahoo.com)

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of the general allocation fund (DAU) and revenue (PAD) of the Local Purchases in West Sumatra in 2005 s / d 2012. Research data obtained from financial statements for Fiscal Year 2005 s / d 2012. By using the data panel, the results of this study that addressed a significant difference between the DAU and revenue Expenditure. Not the Flypaper effect in the province of West Sumatra on regional expenditure, but there is a difference between flypaper between regions that have a low income with areas that have had a high PAD. The implication of this study is that the province of West Sumatra still dependent on transfers from the center because the flypaper effect

Keywords: *General Allocation Fund, Local Revenue, Expenditure, flypaper, Local Purchase*

PENDAHULUAN

Fungsi keuangan adalah bagaimana menggunakan dana seoptimal mungkin. Untuk itu diperlukan fungsi manajemen keuangan diantaranya merencanakan, perolehan dan dan bagaimana agar modal yang diperoleh dapat dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan (Erlita, 2002). Duluor pemerintahan untuk penerapan manajemen keuangan secara bertahap dan berkesinambungan telah diarahkan mengikuti sistem manajemen pada perusahaan, seperti yang tercantum

pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melibatkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terah, terah pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Hulim (2004) Manajemen keuangan daerah secara bertahap dan berkesinambungan telah diarahkan mengikuti sistem manajemen keuangan pada perusahaan. Manajemen Keuangan Daerah dilakukan dengan

milit sistem pengelolaan keuangan berupa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan program kerja dalam bentuk angka-angka. Manajemen keuangan daerah bergesera dalam merencanakan perolehan dana melalui pendapatan daerah dan menggunakan dana tersebut melalui pembiayaan daerah. Sedangkan sistem keuangan daerah tidak berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*) melainkan optimisasi pelayanan public (*public service oriented*) pelayanan hanya lebih banyak ditujukan untuk sekedar pemisahan biaya (*cost recovery*) agar pemerintah dapat terus memberikan pelayanan public secara berkesinambungan (Muhmadi, 2007)

Beberapa tugas dan fungsi keuangan daerah sebenarnya dapat juga dilakukan oleh keuangan swasta (perusahaan), misalnya tugas menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta seperti fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya manajemen keuangan daerah dalam beberapa hal berbeda dengan manajemen perusahaan (swasta) (Mardiasno, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena masyarakat masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Adanya otonomi merupakan perwujudan dari penguasaan sistem pemerintahan, yakni sistem desentralisasi menuju sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, kemadilan, pemerataan, dan pemilihan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah dan antar daerah (Mairisah (2006), Mairisah dan Rudi Akbar 2008)

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasno, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan otonomi daerah juga mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mardiasno (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *swagovernance* fase

for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran daerah disusun bersama oleh eksekutif dan legislatif yang memuat tentang anggaran dan penjelasan pemerintah daerah. Penganggaran merupakan proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, hal ini berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rdnisia perusahaan yang teratup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran harus diformasikan kepada publik (Mardiasno, 2005).

Sumber pendapatan daerah berdasarkan Permenagri No.13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menaruhbkan ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun Anggaran yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang syah.

Dalam UU No.32/2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan, wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Ahmad Yani (2008) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

peremetaan kemampuan keuangan antar daerah untuk memdani kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah belum berkembang dapat diperkecil. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten / kota. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai prwujadan ana desentralisasi.

Kebijakan pengurusan dana tersebut diserahkan ke pemerintah daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsi masing-masing. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerata fakaf antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasarkan kebijakan yang bersifat darurat (Sangit, 2003).

Rakusan Mahi dalam Abdul Halim (2004) kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh (i) relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah, (ii) perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, (iii) kemampuan administrasi pengantian di daerah masih rendah dan (iv)

kemampuan administrasi pemerintahan dan pengawasan masih rendah.

Proposisi PAD yang sudah dilain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dibiyai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Alternatif jangka pendek dari penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan Asli daerah (PAD). Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meringkaskan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dapat menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli daerah (PAD). (Brahmanto, 2002)

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) seperti yang dilakukan oleh Keni Bambang Prakosa yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Widhyanto yang juga meneliti di DIY dan Jawa Tengah memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Maimanah (2006), Maimanah dan Rusdi (2008) yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera.

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah *Flypaper effect*, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grant*) yang diprosikan dengan

Dana Alokasi Umum (DAU) dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oates (dalam Halim, 2002) juga menyatakan *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan meneliti dampak *Flypaper effect* dana alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dengan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris, seperti yang dinyatakan oleh Hines JR. et. Al (1995) yang dikutip oleh Maemunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milu (2001) dalam Maimanah (2006) dan Maimanah dan Rusdi Akbar (2008), menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka waktu panjang dana transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik disegakan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemerintah Daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *Non-linear* dan *asymmetric*.

Prakosa (2004) menjelaskan bahwa sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi

belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanja yang mempengaruhi pendapatan. Sementara studi tentang pengaruh transfer atau grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun.

Ganikhar dan Oates (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Sakri & Halim (2004).

Penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan daerah terutama pajak akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mukerjee, 1990; Brigham, Eugene, et. Al (2001); Legrensi & Milan, 2001; Von Furstenberg et al, 1986. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan (pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja daerah (Thajjouslin 2002); Aziz et al, 2000; Doi, 1998; von Furstenberg et al, 1998), dalam Maimunah dan Rudi Akbar (2008), pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa hipotesis pajak - belanja berlaku untuk kasus pada di beberapa Negara di Amerika Latin, yakni Kolombia, republic

Dominika, Honduras, dan Paraguay (Prakosa, 2004).

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. *Flypaper Effect* merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, dimana *Flypaper Effect* juga disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah mempon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diproteksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproteksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Maimunah, 2006), Maimunah dan Rudi Akbar (2008).

Oates (dalam Halim, 2002) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *Flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Maimunah, (2006) dan Maimunah dan Rudi Akbar (2008) juga mengatakan bahwa terjadinya *Flypaper Effect* dalam merespon belanja transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipala Sumatera, ia juga menilai bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh untuk memprediksi Belanja Daerah periode ke depan.

Kesit Bambang Prakosa (2004), juga mengadakan penelitian serupa untuk daerah Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya adalah secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja

Daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana alokasi Umum (DAU) yang diterima dari transfer (*grants*) oleh pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan telah terjadi *Flypaper Effect*.

Dalam Prakosa (2004), Maimunah (2006) dan Maimunah dan Rusli Akbar (2008) beberapa studi empiris menunjukkan bahwa perbedaan stimulus antara *grants* dan pendapatan sendiri memang terjadi. Slack (1980) melakukan studi analisis dan empiric dengan sampel *municipalities* di Kanada dan menyatakan bahwa *unconditional grants* kepada *municipalities* diringi dengan kenaikan dalam pengeluaran *municipalities* (dengan jumlah yang lebih kecil dari *grants*). Studi Aarberge & Langoren (1997) menganalisis perilaku fiskal dan belanja Pemerintah daerah dengan *revenueless setting* dan menemukan adanya *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap perubahan pendapatan.

Zampelli (1986) memberikan bukti serupa untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadi *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*. Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai anomaly dalam perilaku rasional jika transfer dianggap sebagai perubahan pendapatan masyarakat (seperti pajak), sehingga mestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama (Hiron & Thaler, 1995).

Hasil penelitian Sukri Abdullah & Abdal Halim (2004) menunjukkan terjadi *flypaper effect* dalam merespon (belanja) transfer Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pulau Jawa dan Bali.

Besar kecilnya Pendapatan Asli daerah (PAD) ditabungkan dengan total pendapatan daerah dijadikan salah satu ukuran kemiskinan (kaya atau miskin) daerah. Dengan kata lain, daerah kabupaten/kota tersebut dapat digolongkan pada kabupaten/kota kaya, sedang dan miskin dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan daerahnya / PAD-nya (Halim dkk, 1996).

Mutiara Maimunah dan Rusli Akbar (2008) meneliti *Flypaper Effect* pada belanja bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Umum, dengan menggunakan tiga model regresi berganda yang sama dengan Y yang berbeda. Hasil penelitian menemukan belanja bidang Pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, untuk belanja bidang Kesehatan dan belanja bidang Pelayanan Umum (PU) terjadi *flypaper effect*.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2012. Data penelitian yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah. Sumber data penelitian berasal dari Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Sumatera Barat, yang diperoleh dari Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Belanja Daerah yang disingkat dengan BD merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menggunakan ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam

satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah dalam satu periode. Belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu usaha penerimaan, Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Dana Alokasi Umum yang disingkat dengan DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran Dana Alokasi umum (DAU) dihitung berdasarkan UU No.25 Tahun 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat Jenis Pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sedangkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah / *Local Taxes Receipt*, Retribusi Daerah / *Retribution Receipt*, Retribusi Jasa Umum / *Retribution of Public Service*, Retribusi Jasa Usaha / *Retribution of Commercial Profit*, Retribusi Perizinan Tertentu / *Retribution of specific Permit*, Bagian Laba Usaha Daerah / *Local Government Corporate Profit*, Penerimaan PAD Lainnya / *Other Local Gov. Original receipt*.

2. Analisis Data

2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam suatu pengujian, kemungkinan munculnya dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang telah dasarnya ke dalam serangkaian data. Masalah ini disebut dengan pengujian asumsi klasik yang didalamnya termasuk pengujian normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

2.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengangsumikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dengan uji statistik untuk mendeteksi data berdistribusi normal dapat dilihat dari nilai probability Jergue-bera > tingkat alpha 5 % , maka terdistribusi secara normal, sebaliknya jika nilai Jergue-bera < tingkat alpha 5 % berarti tidak terdistribusi secara normal.

2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada model regresi di terdapat adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi gejala multikolinieritas, yaitu dengan meregresi semua variabel independent, apabila terdapat R² lebih besar dari 0,8 maka ini menandakan telah terjadi multikolinieritas, begitu juga sebaliknya jika nilainya lebih kecil dari 0,8 maka dapat dikatakan tidak terjadi

matikolinieritas. Bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah yang serius (Gujarati, 2004).

2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas digunakan white heteroskedastisitas, dimana jika Obs*R-Squared lebih kecil dari 5 % maka terjadi heteroskedastisitas.

2.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diasumsikan ada permasalahan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi berikutnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena "gangguan" pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan Durbin-Watson Statistic Test. Dengan menggunakan bantuan Eviews 5.0, jika Durbin-Watsonnya antara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

3. Alat Analisis Statistik

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi sederhana (simple regression) dan regresi berganda (multiple regression). Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Untuk mengetahui apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Serta keterkaitannya dengan adanya *flypaper effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1 DAU_t + b_2 PAD_t + e$$

Dimana:

- Y_t = Jumlah Belanja (BD)
- a = Konstanta
- b_1 = Koefisien Regresi DAU_t
- b_2 = Jumlah Dana Alokasi Umum pada tahun t
- PAD_t = Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun t
- e = error term

Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) dibandingkan dengan efek Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja daerah (BD). Dalam regresi berganda tunggal, koefisien regresi, nilai t-statistic, R, R², dan adjusted R² masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila efek (nilai koefisien) Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada efek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keduanya sama-sama signifikan, atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan, maka

dapat dianggap terjadi flypaper effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang menyajikan ringkasan pagaturan atau penyusunan dalam bentuk data tabel *summary* dan grafik. Statistik deskriptif dari data masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Uji Statistik Deskriptif

	BD	DAU	PAO
Mean	448.0396	251.4358	26.69240
Max	683.1960	370.7700	84.81000
Min	148.2300	2.310000	7.480000
SD	139.6545	77.08129	15.73389

Sumber: data diolah

Dari hasil pengolahan data terlihat nilai statistik dari masing-masing variabel penelitian, dimana untuk variabel belajar daerah terlihat bahwa nilai terendah adalah sebesar 198.03 dan nilai tertinggi adalah sebesar 683.19 dan nilai rata-rata adalah sebesar 448.0396 dengan standar deviasi sebesar 139.6545. Jadi terlihat bahwa nilai rata-rata belajar daerah lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan belajar daerah adalah valid.

Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai terendah sebesar 2.31 dan nilai tertinggi adalah sebesar

370.77 dan nilai rata-rata adalah sebesar 251.4358 dengan standar deviasi sebesar 77.08129. Maka tergambar bahwa nilai rata-rata dana alokasi umum lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan dana alokasi umum adalah valid dan bagus. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai terendah sebesar 7.43 dan nilai tertinggi adalah sebesar 64.81 dan nilai rata-rata adalah sebesar 26.6924 dengan standar deviasi sebesar 15.73389. Maka tergambar bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan pendapatan asli daerah adalah cukup baik.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi *poolled least square*, perlu dilakukan uji asumsi klasik agar model tersebut valid dan tidak bias adapun asumsi dasar yang harus dipenuhi antara lain: data terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi diantara variabel-variabel dalam persamaan regresi.

2.1 Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Uji Normalitas Data

	BD	LNBDP2008	LNBDP09	DPJ	DAU	LNPAO
Jumlah Data	3.784069	1.321680	2.552004	2.272002	4.394601	1.682635
Probability	0.152281	0.676386	0.268215	0.321001	0.127175	0.431089

Sumber: data diolah

Hasil pengujian terlihat nilai probabilitas Jarque-Bera untuk semua variabel yang di gunakan dalam penelitian ini $> 0,05$, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

	DAU	LNPAD
DAU	1	0.625978478005
LNPAD	0.625978478005	1

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa korelasi semua variabel independen menunjukkan nilai korelasi lebih rendah dari 0,8. Artinya model yang digunakan terbebas dari adanya gejala multikolinieritas yang serius antar variabel bebas.

2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebar secara merata atau tidak dengan melihat *white heteroskedasticity test*, dimana nilai $Obs^*R\text{-squared}$ lebih besar dari 0,05 (α). Dengan menggunakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *white heteroskedasticity Standard errors* diperoleh nilai $Obs^*R\text{-squared}$ adalah 0,082379 dimana nilai tersebut lebih besar dari α 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan perganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi ini dengan menggunakan *Durbin Watson*. Dari nilai *Durbin Watson* sebesar 1,343990 terletak antara -2

2.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian gejala multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier sempurna beberapa atau semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Uji Multikolinieritas dijelaskan pada tabel 3 berikut:

dengan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan model regresi. Berikut disajikan hasil pengujian masing-masing hipotesis yang di uji dalam penelitian ini.

1. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil pengujianya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji dengan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-65.98401	-	-
DAU	0.752769	0.805645	0.4245
LNPAD	103.5107	3.106259	0.0032
		2.985821	0.0047

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien konstanta sebesar -65,98401 dan nilai koefisien dari dana alokasi umum sebesar 0,752769 nilai t

hitung 3.106259 serta nilai signifikansi sebesar $0.0032 < 0.05$. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah sebesar 103.5107, nilai t hitung 2.965801 serta nilai signifikansi sebesar $0.00417 < 0.05$. Dari hasil ini terlihat bahwa kedua variabel ini signifikan terhadap belanja daerah namun koefisien DAU lebih kecil dari koefisien PAD. Hal ini berarti tidak terjadi *flypaper effect* karena syarat terjadi *flypaper effect* tidak terpenuhi yaitu (1) nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, (2) PAD tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan ditolak yang menyatakan bahwa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah dan Rusli Akbar (2008) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam membiayai belanjanya terdapat *flypaper effect*. Namun hasil penelitian ini menganggapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat dalam membiayai belanja daerahnya tidak terjadi *flypaper effect* karena Pendapatan Asli Daerahnya sendiri lebih dominan digunakan untuk membiayai belanja daerah daripada menggunakan dana yang di transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Karena semakin meningkat Pendapatan Asli daerah maka Belanja Daerah juga akan meningkat.

2. Hasil pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan *flypaper effect* antara daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dengan daerah yang Pendapatan asli daerah (PAD) tinggi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis dengan Independent Sample T Test

	Mean	N	F hit	Sig.	T hit	Sig.
PAD Tinggi	0.128	15	30, 735	0.000	10.281	0.000
PAD Rendah	0.041	35				

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk daerah yang PAD tinggi dengan 15amatan (N) diperoleh nilai rata-rata 0.1287 sementara untuk daerah yang PADnya rendah memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0411 dengan urutan. Hasil F hitung sebesar 30.735 dengan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ artinya secara bersama kedua variannya berbeda. Hasil t hitung sebesar 10.281 dengan signifikansi $0.000 < 0.05$, berarti hipotesis 4 diterima. Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan *flypaper effect* antara daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dengan daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Maimunah dan Rusli Akbar (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *flypaper effect* antara daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dengan daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Hal ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan jumlah daerah urutan (sampel) dan jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD). Maimunah dan Rusli akbar (2008) mengamati 35 sampel yang tersebar di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sedangkan peneliti sendiri hanya mengamati sampel Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Sumatera Barat.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil analisis menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/ kota dalam propinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada propinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Tidak terjadinya *flypaper effect* di propinsi Sumatera Barat terhadap Belanja Daerah (BD). Namun terdapat perbedaan *flypaper effect* antara daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dengan daerah yang Pendapatan asli daerah (PAD) tinggi.

Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dalam mengamati belanja daerah pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat maka dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam membiayai belanja daerah. Dalam rangka otonomi daerah pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat masih tergantung pada transfer dari pusat karena terjadinya *flypaper Effect*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sakriy dan Halim, Abdul. (2003). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Studi kasus kabupaten/kota di Jawa-Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta.
- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston, 2001. Manajemen Keuangan Daerah, penerbit Erlangga, Jakarta, Edisi ketiga.
- Daller, Steven, Craig Malzer. 2005. *Coregional Municipal*

Expenditures with a focus on the flypaper effect. Public Budgeting/fin.

- Erlina, 2002. Manajemen Keuangan : Ulu Digital Library, Universitas Sumatera Utara <http://digilib.usu.ac.id/diaonline/dia/>.
- Grankhor, Shama & Wallace Oates, 1996. *Asymetries in response to increase and decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. National Tax Journal* 49(4): 501-512.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Disertasi, tidak diterbitkan.
- , 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan (UPM) AMP YKPN.
- Hines, J.R. & Richard H. Thaler. 1995. *Anomalies-The flypaper effect. Journal of Economic Perspectives* 9(4): 217-228.
- Isdijoso, Brahmastio. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta), Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.6 No.1.
- Mahmadi, 2007 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Maroesah, D.J. 1995. Sistem administrasi Keuangan daerah Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Maimunah, Muliara. 2006 : *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota*

- di Pulau Sumatera, *Simpunan Nasional Akuntansi 9 Padang*, K-ASPP 04.
- Mairisah, Mutiara dan Akbar Rusdi 2008 : *Hyppaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.11, No.1, Januari 2008.
- Mardiana, 2002. *Onooco dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakosa, Kesit Boribong, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI* Vol.8 No.2, 2004.
- Permensagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Permensagri No.59 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sabrun, 2008. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Tesis (tidak dipublikasikan). Padang: Program Studi Sains Manajemen.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi fiskal dan Keuangan Daerah dalam Onooco*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thajjariin Domai 2002. *Reinvesting Keuangan Daerah studi tentang pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Administrasi Negara, Vol.11 No.02 Maret 2002. [http://www.google.com/r/einvesting keuangan daerah](http://www.google.com/r/einvesting%20keuangan%20daerah) accessed on march 20, 2008.
- Undang-undang Nomor 52 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 53 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah Indonesia,
penerbit RajaGrafindo
persada.

Zampelli, Ernest M. 1986. resource
fungibility, the flypaper effect, and the
Expenditure impact of grants-in-aid.
The Review of economics and Statistic
67, 33-40.